



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA BOGOR  
TAHUN 2022**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BOGOR  
2023**





## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022.

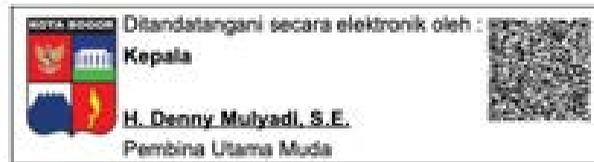
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai kemajuan yang telah di capai oleh BKAD Kota Bogor pada tahun 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan dan peran baik dari seluruh pegawai di lingkungan BKAD Kota Bogor serta sinergi dari semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor.



Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Bogor, Februari 2023





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
A.   Gambaran Umum Organisasi	1
B.   Aspek Strategis Organisasi	4
C.   Permasalahan Utama Organisasi (strategic issue)	7
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	12
A.   Perjanjian Kinerja	12
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	24
A.   Capaian Kinerja Organisasi	24
B.   Realisasi Anggaran	51
<b>BAB IV     PENUTUP</b>	64

**DAFTAR TABEL**

Tabel I. 1	Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022	6
Tabel I. 2	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah	9
Tabel I. 3	Isu Strategis pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024	11
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022	12
Tabel II.2	Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022	14
Tabel III.1	Capaian Kinerja Sasaran Kesatu Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022	25
Tabel III.2	Sumber Daya Manusia Pelaksana Sasaran Ke-1	27
Tabel III.3	Capaian Kinerja Program RPJMD Sasaran Ke-1 Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022	28
Tabel III.4	Capaian Kinerja Sasaran Kedua Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022	38
Tabel III.5	Sumber Daya Manusia Pelaksana Sasaran Ke-2	38
Tabel III.6	Capaian Kinerja Program RPJMD Sasaran Ke-2 Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022	39
Tabel III.7	Capaian Kinerja Sasaran Ketiga Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022	46
Tabel III.8	Sumber Daya Manusia Pelaksana Sasaran Ke-3	46
Tabel III.9	Capaian Kinerja Program RPJMD Sasaran Ke-3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022	47
Tabel III.10	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022	51
Tabel III.11	Realisasi Anggaran Pendapatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022	52
Tabel III.12	Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022	55
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Belanja Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022	57
Tabel III.14	Target dan Realisasi Anggaran Pembiayaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022	59
Tabel III.15	Progres Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Akuntabilitas suatu organisasi pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran

Akuntabilitas instansi pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi instansi di lingkungan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, BKAD dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022 dimaksudkan untuk meyajikan Capaian Indikator Kinerja Sasaran BKAD Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024, Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja BKAD Kota Bogor Tahun 2022.

## **1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Susunan Organisasi**

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 180 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BKAD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaa tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

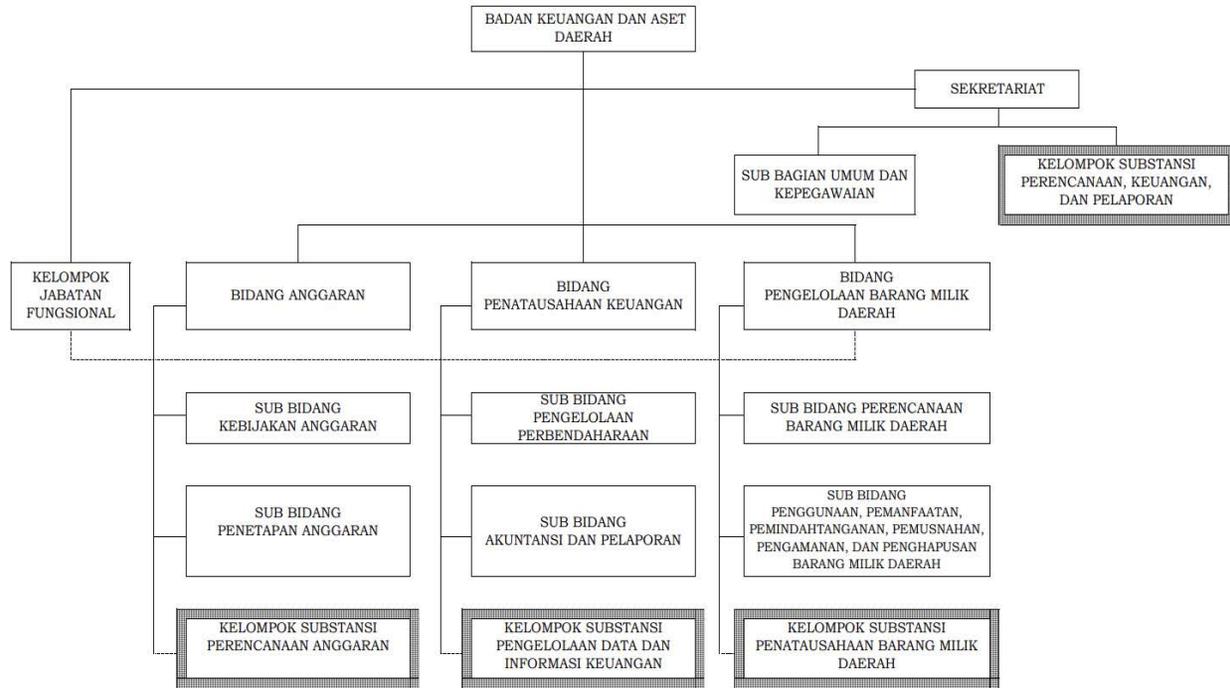
### 3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
  - 2) Sub Bidang Penetapan Anggaran;
  - 3) Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran;
- d. Bidang Penatausahaan Keuangan membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Pengelolaan Perbendaharaan;
  - 2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - 3) Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
  - 2) Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengamanan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - 3) Kelompok Substansi Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi BKAD digambarkan dalam bagan berikut.

### Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor



## B. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana diketahui tahapan pertama RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dari RPJP Kota Bogor 2005 – 2025, Pemerintahan Kota Bogor dalam melaksanakan pembangunan periode 2019 – 2024 menetapkan **VISI** yang lebih terfokus yakni **“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga”**, dan dalam mewujudkannya dengan **MISI**:

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat;
2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas;
3. Mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera;

Renstra BKAD Kota Bogor Tahun 2019-2024 disusun selaras dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang di mana Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi perangkat daerah yang mendukung misi kedua RPJMD Kota Bogor yaitu:

### **“Mewujudkan Kota Cerdas”**

Dalam melaksanakan misi tersebut, BKAD memiliki tujuan Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (smart government) dan Sasaran Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Strategi yang dipedomani dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah Mengembangkan sistem pemerintahan yang integrative melalui

pengatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di level pemerintahan serta arah kebijakan yang diambil adalah Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

#### a) Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kota Bogor 2019 – 2024 diatas adalah sejalan dengan MISI Kedua “**Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**”, maka pengelolaan keuangan dan aset ke depan harus menjadi pendukung utama pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintahan Daerah”.

##### a) Tujuan

Dalam melaksanakan visi dan misi RPJMD Kota Bogr 2019-2024, dimana BKAD mengemban Misi ke-2, yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”, dengan tujuan Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (smart government). Dalam mewujudkan tujuan jangka menengah pembangunan Kota Bogor, BKAD mempunyai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis BKAD Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor” dengan indikator yang diharapkan dicapai adalah Indeks Reformasi Birokrasi berpoin A di tahun 2022.

##### b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untu dapat dilaksanakan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah;
2. Sasaran 2, Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Sasaran 3, Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Tabel I.1**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kota Bogor Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	A
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	80,01
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	83%

## **b) Strategi Dan Kebijakan Perangkat Daerah**

### **a) Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari bagaimana BKAD mendukung Pemerintah Kota Bogor mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD yang pada akhirnya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Bogor. Sesuai dengan Sasaran BKAD yang tertuang dalam Rentra BKAD Tahun 2019-2024, maka strategi BKAD yang kedepannya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Bogor 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1, Meningkatkan kinerja dan pelayanan perangkat daerah
2. Sasaran 2, mempunyai strategi Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu
3. Sasaran 3, mempunyai strategi Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu

### **b) Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Setelah beberapa strategi untuk mencapai tujuan ditetapkan, untuk memperlancar capaian tersebut Badan BKAD akan menetapkan kebijakan. Berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan dalam

mendukung pelaksanaan strategi BKAD, maka arah kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Profesionalisme pelayanan perangkat daerah;
2. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah
3. Profesionalisme pengelolaan Barang Milik Daerah;

### **C. Permasalahan Utama Organisasi (*Strategic Issue*)**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **• Identifikasi Permasalahan Organisasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di BKAD**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja BKAD Kota Bogor, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Kurangnya kuantitas dan perlu ditingkatkan lagi kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah. Ada kalanya hal ini menyebabkan terjadi kesalahan dan atau keterlambatan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang

- sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
- c. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Serta Kementerian Lembaga yang berlokasi di Kota Bogor sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota;
  - d. Data barang milik daerah (BMD) kurang akurat dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Bogor atas beberapa barang milik daerah masih lemah.

Apabila dievaluasi lebih jauh, permasalahan pokok sebagaimana diatas disebabkan karena:

- a. Pengembangan teknologi untuk belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
- b. Kurangnya jumlah personil dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ASN yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;
- c. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implemetasi masih rendah;
- d. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah;
- e. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
- f. Masih Lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Bogor.

Mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan sebagaimana dimaksud diatas, maka ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja BKAD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- a. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan keuangan dan aset daerah. Akselerasi penyesuaian dokumen perencanaan keuangan dan aset daerah kota

Bogor untuk mengimplementasikan kebijakan baru baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh BKAD

- b. Kuantitas dan kualitas SDM BKAD sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan. Dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka secara kuantitas SDM BKAD kota bogor masih kekurangan 28 (dua puluh delapan) orang.
- c. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik di tingkat kota, tingkat provinsi dan di tingkat pusat masih seringkali bersifat parsial, sehingga perencanaan keuangan dan aset daerah seringkali masih belum selaras dan konsisten;
- d. Inskonsistensi kebijakan masih sering terjadi

**Tabel 1.2**

**Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	perwujudan reformasi birokrasi	Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.	Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan
2	Opini BPK terhadap LKPD	Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal
			belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
		Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/ Provinsi	Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi
		Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Kurang memahami peraturan
		Keterbatasan SDM	Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah
		Perubahan Aplikasi	SPI Kurang Optimal
3	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertipikat (Pengamanan hukum terhadap tanah milik	Alas hak tanah tidak ditemukan	Pengarsipan yang tidak tertib

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kota Bogor)		
		Batas tanah tidak diketahui	Patok hilang dan pelaku sejarah sudah tidak ada
		Penyelesaian kasus tanah negara (Tanah dikuasai pihak lain )	Tidak optimalnya dalam pengamanan karena kondisi tanah tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan

- **Isu-isu Strategis Organisasi**

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus diperhatikan adalah:

- a. Peningkatan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan perangkat daerah
- b. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- d. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- f. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja.

**Tabel 1.3**

**Isu Strategis pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024**

<b>Isu Startegis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan perangkat daerah	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	Meningkatkan kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Profesionalisme pelayanan perangkat daerah
Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah
Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku					
Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)					
eBelum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku		Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah secara terpadu	Profesionalisme pengelolaan Barang Milik Daerah

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja BKAD tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Resntra BKAD) Tahun 2019-2024. Perwujudan tujuan dan sasaran BKAD Tahun 2022 dilaksanakan dengan penguatan komitmen kinerja berupa Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam Rencana Strategis (Resntra BKAD) Tahun 2019-2024, pada Tahun 2022 Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan Indeks Kinerja Utama (IKU) BKA. Perjanjian Kinerja BKAD berdasarkan IKU BKAD adalah sebagai berikut.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor**  
**Tahun 2022**

	<b>Tujuan/ Sasaran RPJMD/ Renstra BKAD Tahun 2019-2024</b>	<b>IKU</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
	<b>Tujuan RPJMD Tahun 2019-2024:</b> Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government),			
	<b>Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024:</b> Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel			
	<b>Tujuan Renstra BKAD 2019-2024:</b> Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor			
	<b>Sasaran Renstra BKAD</b> adalah sebagai berikut:			
1	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	80,01	Nilai

Tujuan/ Sasaran RPJMD/ Renstra BKAD Tahun 2019-2024		IKU	Target	Satuan
2	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	Opini
3	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	83	%

Penetapan kinerja BKAD Tahun 2022 adalah dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja, antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki di BKAD Kota Bogor Tahun 2022.

Dokumen penetapan kinerja BKAD ini selanjutnya bermanfaat antara lain untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 mempunyai 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang ingin dicapai selama tahun 2022. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tertuang dalam tabel rencana kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II. 2**  
**Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
	<b>URUSAN: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>BIDANG URUSAN: KEUANGAN</b>					
	<b>Tujuan: Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>A</b>	<b>poin</b>	<b>61.643.627.510,00</b>	
	<b>Sasaran ke-1 Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah</b>	<b>80,01</b>	<b>Nilai</b>	<b>30.880.037.266,00</b>	<b>Kepala BKAD</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah</b>	<b>3,40</b>	<b>Poin</b>	<b>30.880.037.266,00</b>	<b>Sekretaris BKAD</b>
		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>Poin</b>		
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Eavlusi Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>Poin</b>	<b>110.587.700,00</b>	<b>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP BKAD Kota Bogor	1	Dokumen	701.500,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan		



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENJA BKAD Kota Bogor	1	Dokumen	109.886.200,00	
		Tersusunnya RENSTRA BKAD Kota Bogor	1	Dokumen		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1	Dokumen		
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>23.515.924.186,00</b>	<b>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BKAD Kota Bogor	12	Bulan	23.515.924.186,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540	Orang/Bulan		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.347.991.560,00</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	%	20.894.600,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	201.762.860,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran, tabung gas, surat kabar, iklan, dan ATK BKAD Kota Bogor	100	%		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	151.521.100,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan bahan habis pakai rumah tangga BKAD Kota Bogor	100	%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	90.683.000,00	



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
		Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan BKAD Kota Bogor	100	%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	175.980.000,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100	%		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat BKAD Kota Bogor	100	%	322.650.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.384.500.000,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.004.944.300,00</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	663.311.000,00	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Mebel	100	%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	unit	2.341.633.300,00	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana peralatan dan mesin lainnya	100	%		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>949.643.520,00</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	112.890.000,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan telepon BKAD Kota Bogor	100	%		



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	836.753.520,00	
		Persentase pemenuhan tenaga administrasi perkantoran, jasa pengemudi, jasa pramubakti, jasa kebersihan, jasa front office dan jasa keamanan BKAD Kota Bogor	100	%		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>950.946.000,00</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	unit	259.330.000,00	
		Persentase pemenuhan pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	181.930.000,00	
		Persentase pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	%		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	509.686.000,00	
		Persentase pemenuhan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	%		
	<b>Sasaran ke-2: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>Opini</b>	<b>23.570.844.044,00</b>	<b>Kepala BKAD</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>23.570.844.044,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan</li> <li>- Kepala Bidang Anggaran</li> </ul>



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Tingkat ketepatan waktuan Penyusunan Rancangan KUA PPAS</b>	<b>Tepat</b>	<b>Waktu</b>	<b>1.123.424.000,00</b>	<b>Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran</b>
		<b>Tingkat ketepatan waktuan Penyusunan bahan RKA</b>	<b>Tepat</b>	<b>Waktu</b>		<b>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran)</b>
		<b>Tingkat ketepatan waktuan Penyusunan RAPBD</b>	<b>Tepat</b>	<b>Waktu</b>		<b>Kepala Sub Bidang Penetapan Anggaran</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	204.466.000,00	
		Terselesaikannya Dokumen KUA dan PPAS	Seluruh PD	OPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	5.178.000,00	
		Terselesaikannya Dokumen KUPA dan PPASP	Seluruh PD	OPD		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen	129.150.000,00	
		Persentase dokumen RKA-SKPD yang terverifikasi oleh TAPD	100	%		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen	72.330.000,00	
		Persentase dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi oleh TAPD	100	%		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi			60.510.000,00	
		Terselesaikannya penelitian DPA-OPD	Seluruh PD	OPD		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen	60.510.000,00	
		Terselesaikannya penelitian DPPA-OPD	36	OPD		



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	248.765.000,00	
		Buku Penyusunan RAPBD	1	Dokumen		
		Buku Penetapan APBD	1	Dokumen		
		Buku Persetujuan RAPBD Untuk di Evaluasi Gubernur	1	Dokumen		
		Nota Keuangan RAPBD	1	Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	Dokumen	168.675.000,00	
		Buku Penyusunan RPAPBD	1	Dokumen		
		Buku Penetapan Perubahan APBD	1	Dokumen		
		Buku Persetujuan RPAPBD Untuk Dievaluasi Gubernur	1	Dokumen		
		Nota Keuangan RAPBD	1	Dokumen		
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	orang	173.840.000,00	
		Sosialisasi dan monitoring proses perencanaan anggaran	36	PD		
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu Penyampaian LKPD kepada BPK</b>	<b>Tepat</b>	<b>Waktu</b>	<b>248.984.400,00</b>	<b>Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan</b>
		<b>Jumlah Perangkat Daerah sasaran Monitoring laporan keuangan</b>	<b>36</b>	<b>PD</b>		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	10.670.800,0	



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
		Laporan Semester II	1	Dokumen		
		Laporan Semester I	1	Dokumen		
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	Laporan	216.580.000,00	
		Buku Laporan Keuangan Pemkot Bogor	1	Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	21.733.600,00	
		Perda Pertanggung jawaban APBD	1	Dokumen		
		Perwal Penjabaran Pertanggung jawaban APBD	1	Dokumen		
		Raperda Pertanggung jawaban APBD	1	Dokumen		
		Raperwal Penjabaran Pertanggung jawaban APBD	1	Dokumen		
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	405	Orang	21.733.600,00	
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran belanja bunga</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>22.198.435.644,00</b>	<b>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Kelompok Substansi Pengelolaan Data Dan Informasi Keuangan)</b>
		<b>Persentase penyerapan anggaran belanja bantuan keuangan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>		
		<b>Persentase penyerapan anggaran belanja bantuan tidak terduga</b>	<b>80</b>	<b>%</b>		



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	Laporan	5.294.420.034,00	
		Persentase Jumlah Pencairan Berkas SP2D Belanja Bunga terhadap pengajuan SP2D Belanja Bunga yang telah terverifikasi	100	%		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	2.200.000.000,00	
		Persentase Jumlah Pencairan Berkas SP2D Belanja Bankeu terhadap pengajuan SP2D Belanja Bankeu yang telah terverifikasi	100	%		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	14.704.015.610,00	
		Persentase Jumlah Pencairan Berkas SP2D Belanja BTT terhadap pengajuan SP2D Belanja BTT yang telah terverifikasi	100	%		
	<b>Sasaran Ke-3 Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah</b>	<b>83</b>	<b>%</b>	<b>7.192.746.200,00</b>	<b>Kepala BKAD</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan</b>	<b>83</b>	<b>%</b>	<b>7.192.746.200,00</b>	<b>Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>jumlah Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>1</b>	<b>dokumen</b>	<b>7.192.746.200,00</b>	<b>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Kelompok Substansi Penatausahaan Barang Milik Daerah)</b>
		<b>Jumlah sertifikat per tahun</b>	<b>250</b>	<b>sertipikat</b>		<b>Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengamanan,</b>



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
						dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		jumlah draft Keputusan Wali Kota Tentang Standar Harga	2	Draft keputusan		Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah
		jumlah draft Keputusan Wali Kota Tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Draft keputusan		Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah
		jumlah draft Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD Kota Bogor	2	Draft keputusan		Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	8	Dokumen	781.646.000,00	
		Keputusan Wali Kota Tentang Standar Harga Barang Milik Daerah yang tepat waktu	1	dokumen		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	Laporan	298.590.000,00	
		Pemutakhiran Data BMD dan Mutasi BMD	Seluruh PD	OPD		
		Buku Aset Tetap (Unaudited)	1	dokumen		
		Buku Aset Tetap (Audited)	1	dokumen		
		Buku Aset Ekstrakomtabel (Audited)	1	dokumen		
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	400	Laporan	5.121.370.040,00	
		Sertipikat Kepemilikan Tanah	250	dokumen		
		Polis Asuransi	2	dokumen		
		Pembuatan papan nama tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	100	buah		
		Pembuatan Pagar batas tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	2	Lokasi		
		Pembuatan Patok penanda batas tanah Pemerintah Kota Bogor	250	Buah		
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	335.300.000,00	



No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Penanggung Jawab
			Kinerja	Satuan		
		Persentase Laporan Hasil Penilaian KPKNL terhadap pengajuan penilaian BMD	100	%		
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan BMD yang dibuat sesuai pengajuan PD	100	%	539.448.160,00	
		Persentase Keputusan Wali Kota tentang Pemanfaatan BMD yang dibuat sesuai pengajuan PD	100	%		
		Persentase Keputusan Wali Kota tentang Pemindahtanganan BMD yang dibuat sesuai pengajuan PD	100	%		
		Persentase Keputusan Wali Kota tentang Pemusnahan BMD yang dibuat sesuai pengajuan PD	100	%		
		Persentase Keputusan Wali Kota/ Sekda tentang Penghapusan BMD yang dibuat sesuai pengajuan PD	100	%		
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	Dokumen		
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	341	Orang	116.392.000,00	
		Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD kepada Pengurus Barang Pembantu	1	Kali		
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>61.643.627.510,00</b>	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Badan Keuangan dan Aset Kota Bogor Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor, dapat di lihat dalam uraian di bawah sebagai berikut:

##### a. Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kesatu**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
				2019	2020	2021	2022					
1	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	80,01	74,38	82

Sasaran ke-1 Renstra BKAD 2019-2024, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah, memiliki indikator Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah. Indikator nilai tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga belum terdapat nilai target dan realisasi untuk tahun-tahun sebelumnya. Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah tahun 2022 memiliki target 80,01 dengan target kondisi kinerja pada akhir periode renstra BKAD adalah 82. Nilai realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 74,38. Pada Tahun dialokasikan dianggarkan sebesar Rp30.880.037.266,00, dan realisasi sebesar Rp16.850.993.003,00 atau 54,57%

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang masih harus

diperhatikan untuk mengoptimalkan kualitas implementasi reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

- Pola pelaksanaan *change management* khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;
- Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi belum dilaksanakan pada seluruh pegawai;
- Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah ditetapkan, namun belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala;
- Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum diimplementasikan pada seluruh pegawai;
- Telah terdapat keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan, namun belum melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja serta melaksanakan pemutakhiran data kinerja secara berkala;
- Pelaksanaan *public campaign* belum dilakukan secara berkala serta belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi;
- Belum dilaksanakan pembangunan serta monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas;
- Standar pelayanan telah ditetapkan dan di maklumkan, namun belum dilaksanakan rewiu dan perbaikan dengan melibatkan *stakeholders* (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan hasil masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat;
- Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai yang minimal memenuhi unsur penilaian disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan;
- Belum terdapat system pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar; dan

- Pelaksanaan penilaian kepuasan terhadap pelayanan baru dilakukan 1 kali dalam setahun.

Untuk hal tersebut diatas alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani, agar dapat menindaklanjuti kekurangan diatas dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Sumber daya manusia yang melaksanakan perwujudan sasaran ke-1 ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Sumber Daya Manusia Pelaksana Sasaran Ke-1**

No	Struktur Jabatan/ Kepegawaian	Jumlah (orang)	Status
1.	Sekretaris	1	ASN
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	ASN
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	ASN
4.	Pranata Komputer Pertama	1	ASN
5.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	ASN
6.	Bendahara	1	ASN
7.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	ASN
8.	Analisis SDM Aparatur	1	ASN
9.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	ASN
10.	Pengelola Rumah Tangga	2	ASN
11.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	ASN
12.	Pramubakti	1	ASN
13.	Tenaga Non ASN	6	Non ASN
	Total	19	

Realisasi kinerja program terhadap target jangka menengah pada sasaran Ke-1 adalah sebagai berikut.

**Tabel III.3**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD**  
**Sasaran Ke-1**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
				2019		2020		2021		2022		
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	poin	3,5	3,626	3,34	3,386	3,35	3,386	3,4	3,849	3,5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	poin	B	B	B	BB	BB	BB	A	BB	A

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah telah berhasil mencapai target tiap tahunnya dengan target kondisi kinerja pada akhir periode renstra BKAD adalah senilai 3,5. Begitu pula dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah yang realisasi beberapa tahun ke belakang telah berhasil mencapai target dengan target kondisi kinerja pada akhir periode renstra BKAD adalah senilai A, hanya saja untuk tahun 2022 nilai realisasi yang didapatkan adalah BB dari target A.

**Gambar III.1**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD**  
**Sasaran Ke-1**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**



Program RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan BKAD dalam melaksanakan capaian kinerja Sasaran ke-1 Renstra, adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator program adalah

1. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Pada tahun 2022, indikator Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah dicapai dengan poin 3,849 dari target 3,40. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,463 dari nilai realisasi tahun sebelumnya dan merupakan nilai realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan nilai realisasi pada 3 tahun sebelumnya.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Pada tahun 2022, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah dicapai dengan poin BB dari target A.

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan kualitas implementasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah diantaranya sebagai berikut:

- Pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi telah dilakukan, namun perlu terus dilakukan updating secara berkala agar kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi kinerja perangkat daerah;
- Kinerja individu pada setiap pegawai telah ditetapkan, namun belum dilaksanakan pengukuran kinerja individu secara periodik dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment* lainnya;

Untuk hal tersebut diatas alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerja serta melaksanakan capaian kinerja selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program dan Kegiatan atau upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini adalah:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Dianggarkan sebesar Rp30.880.037.266,00, dan realisasi sebesar Rp16.850.993.003,00 atau 54,57%.

Kegiatan:

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp110.587.700,00, dan realisasi sebesar Rp109.157.700,00 atau 98,71%.

Indikator Kegiatan adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah, Tahun 2022 ditargetkan bernilai poin A dan realisasi poin BB

Sub Kegiatan:

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dianggarkan sebesar Rp701.500,00, dan realisasi sebesar Rp701.500,00 atau 100%.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Tahun 2022 ditargetkan 1 dokumen dan realisasinya 2 dokumen, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKAD Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BKAD Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen.

b) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dianggarkan sebesar Rp109.886.200,00, dan realisasi sebesar Rp108.456.200,00 atau 98,70%.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat, Tahun 2022 ditargetkan 1 (satu) dokumen, realisasinya 2 dokumen, yaitu:

- Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BKAD Tahun 2019-2024 sebanyak 1 (satu) dokumen
- Rencana kerja (Renja) Perubahan BKAD Tahun 2022 sebanyak 1 dokumen
- Rencana Kerja (Renja) BKAD Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp23.515.924.186,00, dan realisasi sebesar Rp10.050.100.276,00 atau 42,74%.

Indikator Kegiatan adalah Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100%.

Sub Kegiatan:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dianggarkan sebesar Rp23.515.924.186,00, dan realisasi sebesar Rp10.050.100.276,00 atau 42,74%. Indikator sub kegiatan adalah JumlahOrangyangMenerimaGajidan Tunjangan ASN, Tahun 2022 ditargetkan 540 orang/bulan dan realisasi 540 orang/bulan atau 45 orang selama 12 bulan.

**c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp2.347.991.560,00, dan realisasi sebesar Rp2.087.028.571,00 atau 88,89%.

Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah, dengan target 100% dan realisasi 100%.

Sub Kegiatan:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Dianggarkan sebesar Rp322.650.000,00, dan realisasi sebesar Rp280.952.500,00 atau 87,08%.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Tahun 2022 ditargetkan 12 laporan, realisasinya 12 laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, yaitu:

b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dianggarkan sebesar Rp90.683.000,00, dan realisasi sebesar Rp90.253.500,00 atau 99,53%.

Keluaran Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 1 paket, realisasinya 1 paket Paket Barang Cetakan dan Penggandaan, yaitu berupa:

- Dus Arsip Tebal 1.000 dus
- Map Dinas Bahan Buffalo Berikut Logo Berwarna sebanyak 500 buah
- 1 paket Suvenir/Cendera Mata

c) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dianggarkan sebesar Rp20.894.600,00, dan realisasi sebesar Rp20.589.288,00 atau 98,54%.

Keluaran Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 1 paket, realisasinya 1 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan, yaitu berupa:

- Instalasi Titik Lampu / Stop Kontak (Upah, bahan bangunan dan Alat 30 titik)
- Batu baterai AA 48 buah
- Batu baterai AAA 4 lusin
- Batu baterai Kotak 9 Volt 48 buah
- Kabel listrik 3 roll
- Lampu listrik 50 buah
- Saklar 20 buah

d) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dianggarkan sebesar Rp201.762.860,00, dan realisasi sebesar Rp197.460.060,00 atau 97,87%.

Keluaran Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 1 paket, realisasinya 1 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, yaitu berupa:

- Alat Tulis Ballpoint Pilot Balliner 24 lusin

- Kertas 460 rim
- Kertas memo 36 pak
- Kertas penanda 36 set
- Kertas Stiker Vinyl 50 pak
- Map Odner 25 buah
- Ordner Dan Map 280 buah
- Penjepit Kertas 65 pak
- Materai 200 buah
- Mouse komputer 10 buah
- Peralatan Komputer Lainnya (Converter) MacBook 20 buah
- Tinta/Toner Printer (Toner Canon Cartridge 054 (Black/Yellow/Cyan/Magenta) 90 buah
- Toner Mesin Fotocopi NPG 5 12 buah
- Usb/Flash Disk 70 buah

e) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dianggarkan sebesar 151.521.100,00, dan realisasi sebesar Rp145.304.498,00 atau 95,90%.

Keluaran Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 1 paket, realisasinya 1 paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan, yaitu berupa:

- Pengisian Tabung Gas Isi Tabung Gas 12 Kg sebanyak 6 tabung
- Pot Bunga 33 buah
- Troli Janitor Plastik 2 buah
- Troli Makan Dorong Kaca 1 buah
- Troli Makan Dorong Stainles steel 1 buah
- Piring Saji (Ceper) 3 lusin
- Sabun cuci piring cair 24 buah
- Mangkok dengan logo 24 buah
- Kain Pel Biru 2 lusin
- Kain Pel bertangkai 4 buah
- Piring dengan logo 24 buah
- Sapu Injuk 4 buah
- Sendok Makan 12 set

- antiseptik pembersih tangan 500 ml 50 botol
- Masker bedah 90 box
- Pencucian Kursi, Karpét, Gorden, Lantai dan Dinding 1 paket
- Microwave 1 unit

f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dianggarkan sebesar Rp175.980.000,00, dan realisasi sebesar Rp173.044.000,00 atau 98,33%.

Keluaran Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 12 dokumen, realisasinya 12 dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, yaitu berupa:

- Langganan Surat Kabar selama 1 tahun
- Jasa Konsultansi terkait penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Jasa Konsultansi terkait Penyusunan dan Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP)

g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dianggarkan sebesar Rp1.384.500.000,00, dan realisasi sebesar Rp1.179.424.725,00 atau 85,19%.

Keluaran Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Tahun 2022 ditargetkan 12 laporan, realisasinya 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yaitu antara lain:

- Pelaksanaan capacity building dalam rangka Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan pada hari Jumat dan Sabtu, 02 dan 03 Desember 2022, di CITRA CIKOPO HOTEL & FAMILY COTTAGES Jalan Arion III No. 17, Leuwimalang, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

- Penyelenggaraan capacity building Dalam rangka meningkatkan sinergitas pengelolaan keuangan daerah pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 10 Juni sd 11 Juni 2022 di Situ Cileunca, Pengalengan Kabupaten Bandung
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD di D.I Yogyakarta pada Tanggal 20 Juli 2022 s.d 22 Juli 2022
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam rangka menghadiri undangan dinas, melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah lain.

**d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp3.004.944.300,00, dan realisasi sebesar Rp2.878.300.392,00 atau 95,79%.

Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah, dengan target 90% dan realisasi 90%.

Sub Kegiatan:

a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Dianggarkan sebesar Rp663.311.000,00, dan realisasi sebesar Rp564.752.540,00 atau 85,14%.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 2 unit, realisasinya 2 unit mebel yang disediakan, yaitu berupa:

- Karpet
- Rak Penyimpanan/ Katalog/ Arsip Modifikasi
- RAK Arsip Lanjutan 8 unit
- Kursi 32 unit

b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dianggarkan sebesar Rp2.341.633.300,00, dan realisasi sebesar Rp2.313.547.852,00 atau 98,80%.

Keluaran Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 6 unit, realisasinya antara lain berupa:

- Komputer Rakitan, touchscreen, 24 inchi yang digunakan untuk Alat Survey Kepuasan Masyarakat 1 unit
- Proyektor Epson 2 unit
- AC Central (indoor) 1 unit
- Lemari Es 4 unit
- pembersih udara 10 unit
- Smart Podium 1 unit
- BOR Listrik Charged 1 unit
- Hybride Camera
- Mini Auditorium, yaitu komponen elektronik rapat
- Lensa Kamera 1 unit
- Stabilizer Kamera 1 unit
- System/Power Supply
- Notebook 68 unit
- Harddisk Server 2 buah
- Printer Monochrome BW Superspeed 1 unit
- Server 1 unit
- Jasa Konsultansi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp949.643.520,00, dan realisasi sebesar Rp814.691.156,00 atau 85,79%.

Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan jasa penunjang BKAD Kota Bogor, dengan target 100% dan realisasi 100%.

Sub Kegiatan:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dianggarkan sebesar Rp112.890.000,00, dan realisasi sebesar Rp100.915.162,00 atau 89,39%.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 12 laporan, realisasinya 12 laporan antara, yaitu berupa:

- Pembayaran tagihan telepon selama 12 bulan
- Pembayaran tagihan internet selama 12 bulan

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dianggarkan sebesar Rp836.753.520,00, dan realisasi sebesar Rp713.775.994,00 atau 85,30%.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Tahun 2022 ditargetkan 12 laporan, realisasinya 12 laporan antara, yaitu antara lain:

- Seragam pegawai Non ASN 34 stel
- Penyediaan tenaga Non ASN 16 orang
- Jasa Pembuatan Iklan Media Cetak
- Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN bagi 16 orang selama 12 bulan
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN bagi 16 orang selama 12 bulan
- Iuran Jaminan Kematian Non ASN bagi 16 orang selama 12 bulan
- Jasa pemeliharaan kantor

**f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp950.946.000,00, dan realisasi sebesar Rp911.714.908,00 atau 95,87%.

Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana BMD, dengan target 90% dan realisasi 90%.

Sub Kegiatan:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dianggarkan sebesar Rp259.330.000,00, dan realisasi sebesar Rp243.311.175,00 atau 93,82%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Tahun 2022 ditargetkan 7 unit, realisasinya 7 unit.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dianggarkan sebesar Rp181.930.000,00, dan realisasi sebesar Rp167.999.350,00 atau 92,34%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, Tahun 2022 ditargetkan 30 unit, realisasinya 30 unit, antara lain:

- Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran 1 paket
  - Papan Visual Interaktif 1 paket
  - pemeliharaan sliding door 2 paket
  - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 23 unit
  - Pemeliharaan Printer 5 unit
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dianggarkan sebesar Rp509.686.000,00, dan realisasi sebesar Rp500.404.383,00 atau 98,18%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Tahun 2022 ditargetkan 1 unit, realisasinya 1 unit, yaitu renovasi gedung 91 M2

#### **b. Sasaran 2, Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kedua**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
				2019		2020		2021		2022		
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran ke-2 Renstra BKAD 2019-2024, yaitu Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki indikator Opini BPK. Dapat dilihat pada tabel III.4 bahwa realisasi selama beberapa tahun ke belakang telah mencapai WTP dengan target kondisi kinerja pada akhir periode renstra BKAD adalah WTP. Pada Tahun 2022 pun Opini BPK yang ditargetkan adalah WTP dan realisasinya berhasil mendapatkan Opini WTP. Untuk Sasaran ke-2 dianggarkan sebesar Rp23.570.844.044,00, dan realisasi sebesar Rp13.112.494.889,00 atau 55,63%.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Sasaran ke-2 disebabkan antara lain:

- Laporan Keuangan Daerah disusun secara optimal dan akuntabel
- sistem informasi penyusunan laporan keuangan daerah telah optimal
- dukungan sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia yang melaksanakan perwujudan sasaran ke-2 ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III.5**  
**Sumber Daya Manusia Pelaksana Sasaran Ke-2**

No	Struktur Jabatan/ Kepegawaian	Jumlah (orang)	Status
1.	Kepala Bidang Penatausahaan	1	ASN
2.	Kepala Bidang Anggaran	1	ASN
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	ASN
4.	Kasubid Penetapan Anggaran	1	ASN
5.	Kasubid Kebijakan Anggaran	1	ASN
6.	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan	1	ASN
7.	Kasubid Pengelolaan Perbendaharaan	1	ASN
8.	Analisis Keuangan	2	ASN
9.	Analisis Perencanaan Anggaran	1	ASN
10.	Analisis Bimbingan Akuntansi	1	ASN
11.	Pengelola Keuangan	1	ASN
12.	Penyusun Laporan Keuangan	1	ASN
13.	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1	ASN
14.	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	1	ASN
15.	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ahli Pratama	1	ASN
16.	Tenaga Non ASN	2	Non ASN
	Total	18	

Realisasi kinerja program terhadap target jangka menengah pada sasaran Ke-2 adalah sebagai berikut.

**Tabel III.6**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD**  
**Sasaran Kedua**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
				2019		2020		2021		2022		
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100

Program RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan BKAD dalam melaksanakan capaian kinerja Sasaran ke-2 Renstra, adalah program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator program adalah Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%). Indikator program tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2020 sehingga untuk tahun 2019 tidak terdapat nilai target dan realisasinya.

Dari data tabel III.6 dapat disimpulkan bahwa realisasi dalam beberapa tahun ke belakang telah mencapai target dengan target kondisi kinerja akhir periode renstra BKAD adalah 100%. Pada Tahun 2022, indikator Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%) dicapai 100% dari target 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan antara lain:

- Laporan Keuangan Perangkat Daerah disusun secara akuntabel

- Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) tersedia secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Perangkat Daerah melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan setiap bulan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program dan Kegiatan atau upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini adalah:

### **1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp23.570.844.044,00, dan realisasi sebesar Rp13.112.494.889,00 atau 55,63%.

Kegiatan:

#### **a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp1.123.424.000,00, dan realisasi sebesar Rp775.612.700,00 atau 69,04%.

Pada Tahun 2022 target dan capaian Indikator Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Tingkat ketepatan waktuan Penyusunan Rancangan KUA PPAS ditargetkan tepat waktu dan realisasi tepat waktu
- Tingkat ketepatan waktuan Penyusunan bahan RKA ditargetkan tepat waktu dan realisasi tepat waktu
- Tingkat ketepatan waktuan Penyusunan RAPBD ditargetkan tepat waktu dan realisasi tepat waktu

Sub Kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Dianggarkan sebesar Rp248.765.000,00, dan realisasi sebesar Rp187.240.000,00 atau 75,27%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Tahun 2022 ditargetkan 2 dokumen dan realisasinya 2 dokumen, yaitu:

- Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023
  - Dokumen Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun 2023
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  
Dianggarkan sebesar Rp168.675.000,00, dan realisasi sebesar Rp161.210.200,00 atau 95,57%.  
Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Tahun 2022 ditargetkan 6 dokumen dan realisasinya sebagai berikut:
- Dokumen perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen
  - Dokumen Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun 2022 sebanyak 5 dokumen
  - Dokumen Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 sebanyak 1 dokumen
  - Dokumen Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 sebanyak 4 dokumen
- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  
Dianggarkan sebesar Rp129.150.000,00, dan realisasi sebesar Rp92.635.000,00 atau 71,73%.  
Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi, Tahun 2022 ditargetkan 1 dokumen dan realisasinya 1 dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  
Dianggarkan sebesar Rp60.510.000,00, dan realisasi sebesar Rp24.200.000,00 atau 39,99%.  
Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi, Tahun 2022 ditargetkan 1 dokumen dan realisasinya 1 dokumen DPA- SKPD yang Diverifikasi.

- e) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD  
Dianggarkan sebesar Rp72.330.000,00, dan realisasi sebesar Rp52.610.000,00 atau 72,74%.  
Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi, Tahun 2022 ditargetkan 1 dokumen dan realisasinya 1 dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi.
- f) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  
Dianggarkan sebesar Rp60.510.000,00, dan realisasi sebesar Rp26.495.500,00 atau 43,79%.  
Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi, Tahun 2022 ditargetkan 1 dokumen dan realisasinya 1 dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi.
- g) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  
Dianggarkan sebesar Rp204.466.000,00, dan realisasi sebesar Rp181.954.000,00 atau 88,99%.  
Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun, Tahun 2022 ditargetkan 2 dokumen dan realisasinya 2 dokumen KUA dan PPAS yang Disusun.
- h) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  
Dianggarkan sebesar Rp5.178.000,00, dan realisasi sebesar Rp5.068.000,00 atau 97,88%.  
Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun, Tahun 2022 ditargetkan 2 dokumen dan realisasinya 2 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun.
- i) Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  
Dianggarkan sebesar Rp173.840.000,00, dan realisasi sebesar Rp44.200.000,00 atau 25,43%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Tahun 2022 ditargetkan 100 orang dan realisasinya 100 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran.

**b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp248.984.400,00, dan realisasi sebesar Rp235.634.000,00 atau 94,64%.

Pada Tahun 2022 target dan capaian Indikator Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Tingkat ketepatan waktu Penyampaian LKPD kepada BPK ditargetkan tepat waktu dan realisasi tepat waktu
- Jumlah Perangkat Daerah sasaran Monitoring laporan keuangan ditargetkan 36 PD realisasi 36 PD

Sub Kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Dianggarkan sebesar Rp10.670.800,00, dan realisasi sebesar Rp10.200.000,00 atau 95,59%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran, Tahun 2022 ditargetkan 12 dokumen dan realisasinya 12 dokumen, yaitu:

- b) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dianggarkan sebesar Rp216.580.000,00, dan realisasi sebesar Rp205.480.000,00 atau 94,87%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi, Tahun 2022 ditargetkan 7 dokumen dan realisasinya 7 dokumen, yaitu:

- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

Dianggarkan sebesar Rp21.733.600,00, dan realisasi sebesar Rp19.954.000,00 atau 91,81%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota, Tahun 2022 ditargetkan 2 dokumen dan realisasinya 2 dokumen, yaitu:

- Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
- Dokumen Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

**c. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp22.198.435.644,00, dan realisasi sebesar Rp12.101.248.189,00 atau 54,51%.

Pada Tahun 2022 target dan capaian Indikator Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Persentase penyerapan anggaran belanja bunga ditargetkan 80 % realisasi 85,65%
- Persentase penyerapan anggaran belanja bantuan keuangan ditargetkan 80 % realisasi 98,22%
- Persentase penyerapan anggaran belanja bantuan tidak terduga ditargetkan 80 % realisasi 36,50%

Sub Kegiatan:

a) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Dianggarkan sebesar Rp5.294.420.034,00, dan realisasi sebesar Rp4.573.784.765,00 atau 86,39%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah,

Tahun 2022 ditargetkan 1 laporan dan realisasinya 1 laporan pembayaran Bunga Utang Pinjaman PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor atas IBRD 7730- ID/Pinjaman Word Bank SLA-1226/DSMI/2009

b) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Dianggarkan sebesar Rp2.200.000.000,00, dan realisasi sebesar Rp2.160.750.000,00 atau 98,22%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Tahun 2022 ditargetkan 1 laporan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- Laporan Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor 1 laporan
- Laporan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Cianjur (Gempa Kabupaten Cianjur) 1 laporan

c) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Dianggarkan sebesar Rp14.704.015.610,00, dan realisasi sebesar Rp5.366.713.424,00 atau 36,50%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Tahun 2022 ditargetkan 1 laporan dan realisasinya 1 laporan Belanja Tidak Terduga.

**c. Sasaran 3, Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran Ketiga**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
				2019		2020		2021		2022		
1	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	-	-	81	81	82	82	83	83	85

Sasaran ke-3 Renstra BKAD 2019-2024, yaitu Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah, memiliki indikator Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah. Indikator tersebut

merupakan indikator baru pada tahun 2020 sehingga untuk tahun 2019 belum terdapat nilai target dan realisasinya.

Dari data tabel III.7 dapat disimpulkan bahwa realisasi dalam beberapa tahun ke belakang telah mencapai target dengan target kondisi kinerja pada akhir periode renstra BKAD adalah sebesar 85%. Untuk Sasaran ke-3 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp7.192.746.200,00, dan realisasi sebesar Rp5.759.791.600,00 atau 80,08%, sedangkan untuk kinerjanya sendiri Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah ditargetkan 83% dan realisasinya tercapai sebesar 83%.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Sasaran ke-3 ini disebabkan antara lain:

- pengadministrasian barang milik daerah terus dioptimalkan

Sumber daya manusia yang melaksanakan perwujudan sasaran ke-3 ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Sumber Daya Manusia Pelaksana Sasaran Ke-3**

No	Struktur Jabatan/ Kepegawaian	Jumlah (orang)	Status
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	ASN
2.	Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	ASN
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	ASN
4.	Kasubid Perencanaan Barang Milik Daerah	1	ASN
5.	Analisis Aset Daerah	6	ASN
6.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	ASN
7.	Kasubid Pengelolaan Perbendaharaan	1	ASN
8.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	2	ASN
9.	Penyusun Laporan Keuangan	1	ASN
10.	Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang	1	ASN
11.	Tenaga Non ASN	1	Non ASN
	Total	17	

Realisasi kinerja program terhadap target jangka menengah pada sasaran Ke-3 adalah sebagai berikut.

**Tabel III.9**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD**  
**Sasaran Ke-3**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
				2019		2020		2021		2022		
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengeloaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	-	-	81	81	82	82	83	83	85

Program RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan BKAD dalam melaksanakan capaian kinerja Sasaran ke-3 Renstra, adalah program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator program adalah Persentase administrasi pengeloaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan dengan target kondisi kinerja pada akhir periode renstra BKAD adalah sebesar 85%. Indikator program tersebut merupakan indikator baru sehingga untuk tahun 2019 tidak terdapat nilai target dan realisasinya.

Dari data pada gambar III.2 dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan target di tiap tahunnya dengan realisasi yang diperoleh berhasil mencapai target. Pada Tahun 2022, indikator Persentase administrasi pengeloaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan dicapai 83% dari target 83%.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini disebabkan antara lain:

- pengadministrasian barang milik daerah terus dioptimalkan

**Gambar III.2**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD**  
**Sasaran Ke-3**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program dan Kegiatan atau upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini adalah:

**1) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp7.192.746.200,00, dan realisasi sebesar Rp5.759.791.600,00 atau 80,08%.

Kegiatan:

**d. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Dianggarkan sebesar Rp7.192.746.200,00, dan realisasi sebesar Rp5.759.791.600,00 atau 80,08%.

Pada Tahun 2022 target dan capaian Indikator Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah ditargetkan 1 laporan dan realisasi 1 laporan Barang Milik Daerah
- Jumlah sertifikat per tahun ditargetkan 250 sertifikat dan realisasi 162 sertifikat
- Jumlah draft Keputusan Wali Kota Tentang Standar Harga ditargetkan 2 draft Keputusan dan realisasi 2 draft Keputusan Wali Kota Tentang Standar Harga
- Jumlah draft Keputusan Wali Kota Tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah ditargetkan 2 draft

- Keputusan dan realisasi 2 draft Keputusan Wali Kota Tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- jumlah draft Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD Kota Bogor ditargetkan 2 draft Keputusan dan realisasi 2 draft Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD Kota Bogor

Sub Kegiatan:

a) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga

Dianggarkan sebesar Rp781.646.000,00, dan realisasi sebesar Rp765.970.000,00 atau 97,99%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Standar Harga yang Disusun, Tahun 2022 ditargetkan 8 dokumen dan realisasinya 8 dokumen standar harga, yaitu:

- Dokumen ASB Fisik 2023 1 dokumen
- Dokumen ASB Non Fisik 2023 1 dokumen
- Dokumen HSPK 2023 1 dokumen
- Dokumen HSPK 2024 1 dokumen
- Dokumen Standar Harga Satuan Konstruksi 2023 1 dokumen
- Dokumen Standar Harga Satuan Konstruksi 2024 1 dokumen
- Dokumen Standar Harga Satuan Non Konstruksi 2023 1 dokumen
- Dokumen Standar Harga Satuan Non Konstruksi 2024 1 dokumen

b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dianggarkan sebesar Rp298.590.000,00, dan realisasi sebesar Rp184.405.500,00 atau 61,76%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Tahun 2022 ditargetkan 8 laporan dan realisasinya 8 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah, yaitu:

- Laporan Aset Audited A sebanyak 1 laporan
- Laporan Aset Audited B sebanyak 1 laporan
- Laporan Aset Audited C sebanyak 1 laporan

- Laporan Aset Audited D sebanyak 1 laporan
- Laporan Aset Audited E sebanyak 1 laporan
- Laporan Aset Audited Extracomtable sebanyak 1 laporan
- Laporan Aset Audited F sebanyak 1 laporan
- Laporan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi BMD 1 laporan

c) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Dianggarkan sebesar Rp5.121.370.040,00, dan realisasi sebesar Rp4.121.116.610,00 atau 80,47%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah, Tahun 2022 ditargetkan 400 laporan dan realisasinya 558 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah, yaitu:

- Laporan Sertipikat Kepemilikan Tanah 162 laporan
- Laporan Polis Asuransi 2 laporan
- Laporan Pembuatan papan nama tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor 60 laporan
- Laporan Pembuatan Pagar batas tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor 9 Laporan
- Laporan Pembuatan Patok penanda batas tanah Pemerintah Kota Bogor 325 Laporan

d) Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

Dianggarkan sebesar Rp335.300.000,00, dan realisasi sebesar Rp114.850.000,00 atau 34,25%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah, Tahun 2022 ditargetkan 2 laporan dan realisasinya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah, yaitu:

- Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah atas penjualan barang milik daerah 1 laporan
- Hasil Penilaian Barang Milik Daerah atas sewa barang milik daerah 1 laporan

- e) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Dianggarkan sebesar Rp539.448.160,00, dan realisasi sebesar Rp458.069.490,00 atau 84,91%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik

Daerah, Tahun 2022 ditargetkan 2 laporan dan realisasinya, yaitu:

- Laporan pelaksanaan pekerjaan bongkar pasang cold storage 1 laporan
- Laporan pelaksanaan pemeliharaan gedung milik daerah 1 laporan

- f) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Dianggarkan sebesar Rp116.392.000,00, dan realisasi sebesar Rp115.380.000,00 atau 99,13%.

Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Tahun 2022 ditargetkan 341 Orang dan realisasinya 341 Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## B. Realisasi Anggaran

Gambaran struktur anggaran pendapatan dan belanja pada BKAD disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel III.10**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.380.962.639,00	54.708.249.988,00	98,79
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.673.248.217.735,00	1.604.878.506.106,00	95,91
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.728.634.081.624,00</b>	<b>1.659.642.235.344,00</b>	<b>96,01</b>

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
5.1	BELANJA OPERASI	39.528.519.600,00	23.171.436.274,00	58,62
5.2	BELANJA MODAL	5.211.092.300,00	5.024.379.794,00	96,42
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50
5.4	BELANJA TRANSFER	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>61.643.627.510,00</b>	<b>35.723.279.492,00</b>	<b>57,95</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>1.666.990.454.114,00</b>	<b>1.623.918.955.852,00</b>	<b>97,42</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	370.498.967.958,00	312.453.495.068,00	84,33
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.892.032.260,00	9.878.849.606,00	99,87
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>380.391.000.218,00</b>	<b>302.574.645.462,00</b>	<b>79,54</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>2.027.597.389.812,00</b>	<b>1.926.493.601.314,00</b>	<b>95,01</b>

Struktur anggaran belanja dan pendapatan pada BKAD Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

**a) Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada BKAD Tahun 2022**

Realisasi anggaran Pendapatan Daerah pada BKAD Tahun 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel III. 11**  
**Realiasi Anggaran Pendapatan**  
**pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022**

Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	55.380.962.639,00	54.708.249.988,00	98,79
4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.244.880.366,00	124,49
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000.000,00	1.244.880.366,00	124,49
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000.000,00	1.244.880.366,00	124,49
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.094.840.279,00	10.094.840.279,00	100,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	390.694.001,00	390.694.001,00	100,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	21.683.963.684,00	21.684.514.000,00	100,00
4.1.04	Lain - lain PAD yang Sah	22.211.464.675,00	21.293.321.342,00	95,87



Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	360.000.000,00	283.196.724,00	78,67
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	360.000.000,00	6.850.600,00	1,90
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	276.346.124,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	211.464.675,00	173.700.900,00	82,14
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	211.464.675,00	173.700.900,00	82,14
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	11.500.000.000,00	10.845.422.050,00	94,31
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.500.000.000,00	10.498.476.860,00	91,29
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	343.348.240,00	0,00
4.1.04.05.03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	3.596.950,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.286.930.015,00	85,74
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.286.930.015,00	85,74
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.500.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	6.500.000,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.400.000.000,00	2.786.038.456,00	116,08
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.400.000.000,00	2.786.038.456,00	116,08
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	2.587.219.832,00	103,49
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	2.587.219.832,00	103,49
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.410.684,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	1.410.684,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	240.000.000,00	299.251.691,00	124,69
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	57.400.000,00	57.915.215,00	100,90
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	182.419.000,00	241.070.000,00	132,15
4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	45.000,00	66.618,00	148,04
4.1.04.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	136.000,00	199.858,00	146,95
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	2.650.990,00	0,00
4.1.04.17.01	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	2.650.990,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	21.000.000,00	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	21.000.000,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.673.248.217.735,00</b>	<b>1.604.878.506.106,00</b>	<b>95,91</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.277.870.323.115,00	1.215.444.435.539,00	95,11
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.245.563.899.115,00	1.183.138.011.539,00	94,99
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	98.284.640.000,00	116.419.589.771,00	118,45
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00	99,17
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.763.280.995,00	79.141.831.118,00	90,18
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	307.653.433.120,00	241.917.237.450,00	78,63
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	32.306.424.000,00	32.306.424.000,00	100,00
4.2.01.02.01	DID	32.306.424.000,00	32.306.424.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	395.377.894.620,00	389.434.070.567,00	98,50
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	299.438.274.620,00	295.657.846.999,00	98,74
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	299.438.274.620,00	295.657.846.999,00	98,74
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	95.939.620.000,00	93.776.223.568,00	97,75

Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	95.939.620.000,00	93.776.223.568,00	97,75
<b>4.3</b>	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94
4.3.03.01	Lain - lain Pendapatan	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	1.728.634.081.624,00	1.659.642.235.344,00	96,01

Jumlah Pendapatan Daerah pada BKAD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.728.634.081.624,00 dan realisasi sebesar Rp1.659.642.235.344,00 atau 96,01%. Berikut rincian Pendapat Daerah pada BKAD Tahun 2022.

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp55.380.962.639,00, dan realisasi sebesar Rp54.708.249.988,00 atau 98,79%. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
  - 1) Retribusi Daerah, dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00, dan realisasi sebesar Rp1.244.880.366,00 atau 124,49%.
  - 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dianggarkan sebesar Rp32.169.497.964,00, dan realisasi sebesar Rp32.170.048.280,00 atau 100%.
  - 3) Lain-lain PAD yang Sah, dianggarkan sebesar Rp22.211.464.675,00, dan realisasi sebesar Rp21.293.321.342,00 atau 95,87%.
2. Pendapatan Transfer, dianggarkan sebesar Rp1.673.248.217.735,00, dan realisasi sebesar Rp1.604.878.506.106,00 atau 95,91%. Pendapatan Transfer terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dianggarkan sebesar Rp1.277.870.323.115,00, dan realisasi sebesar Rp1.215.444.435.539,00 atau 95,11%.
  - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, dianggarkan sebesar Rp395.377.894.620,00, dan realisasi sebesar Rp389.434.070.567,00 atau 98,50%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dianggarkan sebesar Rp4.901.250,00, dan realisasi sebesar Rp55.479.250,00 atau

1.131,94%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:

- 1) Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan, dianggarkan sebesar Rp4.901.250,00, dan realisasi sebesar Rp55.479.250,00 atau 1.131,94%

#### **b) Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada BKAD Tahun 2022**

Realisasi anggaran Belanja Daerah pada BKAD Tahun 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel III. 12**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah**  
**pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	39.528.519.600,00	23.171.436.274,00	58,62
5.1.01	Belanja Pegawai	23.885.684.186,00	10.369.150.276,00	43,41
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.433.393.575,00	3.047.793.971,00	18,55
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.180.331.256,00	2.123.770.500,00	97,41
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	233.638.919,00	228.586.040,00	97,84
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	292.510.428,00	170.310.000,00	58,22
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.561.519,00	13.440.000,00	99,10
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.086.015,00	67.060.000,00	94,34
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	146.339.270,00	143.029.500,00	97,74
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.486.040,00	34.306.725,00	94,03
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.894,00	31.917,00	97,03
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	254.079.692,00	249.780.812,00	98,31
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.465.027,00	4.369.595,00	97,86
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.395.199,00	13.108.882,00	97,86
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.187.467.316,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.082.530.611,00	7.002.306.305,00	98,87
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.755.078.958,00	1.708.253.085,00	97,33
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.793.918.683,00	2.777.915.440,00	99,43
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.533.532.970,00	2.516.137.780,00	99,31
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	369.760.000,00	319.050.000,00	86,29
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	369.760.000,00	319.050.000,00	86,29
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.642.835.414,00	8.519.919.208,00	80,05
5.1.02.01	Belanja Barang	1.152.724.712,00	1.070.949.806,00	92,91
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.152.724.712,00	1.070.949.806,00	92,91
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.606.465.302,00	4.928.299.769,00	74,60
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.671.966.074,00	2.406.210.937,00	65,53
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.093.908.068,00	903.036.292,00	82,55
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.026.000,00	21.445.000,00	93,13
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	321.358.160,00	312.427.140,00	97,22
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.496.207.000,00	1.285.180.400,00	85,90
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.205.020.400,00	1.169.259.908,00	97,03
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	519.704.400,00	486.261.825,00	93,57
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	685.316.000,00	682.998.083,00	99,66
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.678.625.000,00	1.351.409.725,00	80,51

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.678.625.000,00	1.351.409.725,00	80,51
5.1.03	Belanja Bunga	5.000.000.000,00	4.282.366.790,00	85,65
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	4.282.366.790,00	85,65
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	5.000.000.000,00	4.282.366.790,00	85,65
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.211.092.300,00</b>	<b>5.024.379.794,00</b>	<b>96,42</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.074.962.300,00	2.949.395.628,00	95,92
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.339.625.700,00	1.225.113.688,00	91,45
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	617.999.000,00	611.293.090,00	98,91
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	721.626.700,00	613.820.598,00	85,06
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	422.621.400,00	416.526.840,00	98,56
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	422.621.400,00	416.526.840,00	98,56
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.315.200,00	10.972.500,00	96,97
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	11.315.200,00	10.972.500,00	96,97
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.301.400.000,00	1.296.782.600,00	99,65
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.074.400.000,00	1.072.360.000,00	99,81
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	227.000.000,00	224.422.600,00	98,86
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.076.130.000,00	2.015.822.054,00	97,10
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.076.130.000,00	2.015.822.054,00	97,10
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.076.130.000,00	2.015.822.054,00	97,10
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	59.162.112,00	98,60
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	59.162.112,00	98,60
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	59.162.112,00	98,60
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>14.704.015.610,00</b>	<b>5.366.713.424,00</b>	<b>36,50</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>2.200.000.000,00</b>	<b>2.160.750.000,00</b>	<b>98,22</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>61.643.627.510,00</b>	<b>35.723.279.492,00</b>	<b>57,95</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>1.666.990.454.114,00</b>	<b>1.623.918.955.852,00</b>	<b>97,42</b>

Jumlah Belanja Daerah pada BKAD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp61.643.627.510,00 dan realisasi sebesar Rp35.723.279.492,00 atau 57,95%. Berikut rincian Pendapat Daerah pada BKAD Tahun 2022.

1. Belanja Operasi, dianggarkan sebesar Rp39.528.519.600,00 dan realisasi sebesar Rp23.171.436.274,00 atau 58,62%. Belanja Operasi terdiri dari:

1) Belanja Pegawai, dianggarkan sebesar Rp23.885.684.186,00 dan realisasi sebesar Rp10.369.150.276,00 atau 43,41%.

2) Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan sebesar Rp10.642.835.414,00 dan realisasi sebesar Rp8.519.919.208,00 atau 80,05%.

- 3) Belanja Bunga, dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.282.366.790,00 atau 85,65%.
2. Belanja Modal, dianggarkan sebesar Rp5.211.092.300,00 realisasi sebesar Rp5.024.379.794,00 atau 96,32%. Belanja Modal terdiri dari:
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dianggarkan sebesar Rp3.074.962.300,00 realisasi sebesar Rp2.949.395.628,00 atau 95,92%.
  - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dianggarkan sebesar Rp2.076.130.000,00 realisasi sebesar Rp2.015.822.054,00 atau 97,10%.
  - 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 realisasi sebesar Rp59.162.112,00 atau 98,60%.
3. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sebesar Rp14.704.015.610,00 realisasi sebesar Rp5.366.713.424,00 atau 36,50%.
4. Belanja Transfer, yaitu Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sebesar Rp2.200.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.160.750.000,00 atau 98,22%.

Realisasi anggaran Belanja Daerah pada BKAD Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel III. 13**  
**Realisasi Anggaran Belanja Program dan Kegiatan**  
**pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2022**

Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	30.880.037.266,00	16.850.993.003,00	54,57
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	110.587.700,00	109.157.700,00	98,71
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.886.200,00	108.456.200,00	98,70
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	701.500,00	701.500,00	100,00
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	23.515.924.186,00	10.050.100.276,00	42,74
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.515.924.186,00	10.050.100.276,00	42,74



Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	2.347.991.560,00	2.087.028.571,00	88,89
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.894.600,00	20.589.288,00	98,54
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.762.860,00	197.460.060,00	97,87
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	151.521.100,00	145.304.498,00	95,90
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.683.000,00	90.253.500,00	99,53
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	175.980.000,00	173.044.000,00	98,33
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	322.650.000,00	280.952.500,00	87,08
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.384.500.000,00	1.179.424.725,00	85,19
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	3.004.944.300,00	2.878.300.392,00	95,79
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	663.311.000,00	564.752.540,00	85,14
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.341.633.300,00	2.313.547.852,00	98,80
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	949.643.520,00	814.691.156,00	85,79
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.890.000,00	100.915.162,00	89,39
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	836.753.520,00	713.775.994,00	85,30
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	950.946.000,00	911.714.908,00	95,87
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.330.000,00	243.311.175,00	93,82
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.930.000,00	167.999.350,00	92,34
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	509.686.000,00	500.404.383,00	98,18
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	23.570.844.044,00	13.112.494.889,00	55,63
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH</b>	1.123.424.000,00	775.612.700,00	69,04
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	204.466.000,00	181.954.000,00	88,99
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5.178.000,00	5.068.000,00	97,88
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	129.150.000,00	92.635.000,00	71,73
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	72.330.000,00	52.610.000,00	72,74
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	60.510.000,00	24.200.000,00	39,99
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	60.510.000,00	26.495.500,00	43,79
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	248.765.000,00	187.240.000,00	75,27
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	168.675.000,00	161.210.200,00	95,57
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	173.840.000,00	44.200.000,00	25,43
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>	248.984.400,00	235.634.000,00	94,64
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.670.800,00	10.200.000,00	95,59

Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	216.580.000,00	205.480.000,00	94,87
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	21.733.600,00	19.954.000,00	91,81
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	22.198.435.644,00	12.101.248.189,00	54,51
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5.294.420.034,00	4.573.784.765,00	86,39
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	7.192.746.200,00	5.759.791.600,00	80,08
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	7.192.746.200,00	5.759.791.600,00	80,08
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	781.646.000,00	765.970.000,00	97,99
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	298.590.000,00	184.405.500,00	61,76
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	5.121.370.040,00	4.121.116.610,00	80,47
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	335.300.000,00	114.850.000,00	34,25
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	539.448.160,00	458.069.490,00	84,91
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116.392.000,00	115.380.000,00	99,13
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	61.643.627.510,00	35.723.279.492,00	57,95

### c) Realisasi anggaran Pembiayaan pada BKAD Kota Bogor tahun 2022

Target dan realisasi anggaran Pembiayaan pada BKAD Kota Bogor tahun 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.14**  
**Target dan Realisasi Anggaran Pembiayaan**  
**pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor**  
**Tahun 2022**

Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	370.498.967.958,00	312.453.495.068,00	84,33
<b>6.1.01</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>365.001.935.698,00</b>	<b>306.968.728.892,00</b>	<b>84,10</b>
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	69.471.113.858,00	0,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD - Pajak Daerah	0,00	65.432.243.670,00	0,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD - Retribusi Daerah	0,00	4.038.870.188,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	79.320.583.698,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - Transfer Pemerintah Pusat	0,00	79.320.583.698,00	0,00
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	2.361.983.265,00	0,00

Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
6.1.01.04.03	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	2.361.983.265,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	33.473.881.988,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja - Belanja Operasi	0,00	24.723.761.714,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	8.710.870.274,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	39.250.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	365.001.935.698,00	106.619.802.073,00	29,21
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	365.001.935.698,00	106.619.802.073,00	29,21
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	15.721.364.010,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	8.987.765.803,00	0,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	6.733.598.207,00	0,00
<b>6.1.05</b>	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</b>	<b>5.497.032.260,00</b>	<b>5.484.766.176,00</b>	<b>99,78</b>
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78
6.1.05.03.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.892.032.260,00</b>	<b>9.878.849.606,00</b>	<b>99,87</b>
<b>6.2.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>4.395.000.000,00</b>	<b>4.394.083.430,00</b>	<b>99,98</b>
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.395.000.000,00	4.394.083.430,00	99,98
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.395.000.000,00	4.394.083.430,00	99,98
<b>6.2.03</b>	<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	<b>5.497.032.260,00</b>	<b>5.484.766.176,00</b>	<b>99,78</b>
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat - Penerusan Pinjaman Luar Negeri - Jangka Panjang	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>380.391.000.218,00</b>	<b>302.574.645.462,00</b>	<b>79,54</b>

Jumlah Pembiayaan Netto pada BKAD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp359.460.312.640,00 dan realisasi sebesar Rp350.054.105.689,00 atau 97,38%. Pembiayaan Daerah pada BKAD Tahun 2022 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp370.498.967.958,00 dan realisasi sebesar Rp312.453.495.068,00 atau 84,33%.

Rincian Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp365.001.935.698,00 dan realisasi sebesar Rp319.648.690.938,00 atau 97,60%.
- 2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dianggarkan sebesar Rp5.497.032.260,00 dan realisasi sebesar Rp5.484.766.176,00 atau 99,78%.

2. Pengeluaran Pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp9.892.032.260,00 dan realisasi sebesar Rp9.878.849.606,00 atau 99,87%. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dianggarkan sebesar Rp5.497.032.260,00 dan realisasi sebesar Rp5.484.766.176,00 atau 99,78%.
- 2) Penyertaan Modal Daerah, dianggarkan sebesar Rp4.395.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.394.083.430,00 atau 99,98%.

• **Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan poin rekomendasi atas catatan kelemahan/kekurangan untuk perbaikan yang terdapat dalam Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Nomor 700/482-Itda tanggal 30 Juli 2021, maka dilakukan tindak lanjut atas hal tersebut dengan informasi seperti tabel di bawah ini.

**Tabel III.15**  
**Progres Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRES		
			SELESAI	DALAM PROSES	BELUM PROSES
1.	Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART ( <i>Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound</i> ) dan cukup.  Target kinerja yang baik menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai, berdasarkan indikator yang SMART, basis data yang memadai, argument dan perhitungan yang logis.	Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART ( <i>Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound</i> ) dan cukup.	<b>V</b>		
2.	Dokumen Renstra sebaiknya mengacu kepada seluruh kriteria yang ditetapkan baik itu tujuan/hasil program, sasaran maupun indikator.	Dokumen Renstra disusun dengan mengacu kepada seluruh kriteria yang ditetapkan baik itu tujuan/hasil program, sasaran maupun indikator.	<b>V</b>		
3.	Target kinerja dalam rencana aksi agar dipantau kemajuannya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan pada prosentase capaian keluaran dari target yang telah ditetapkan ( <i>output dan outcome</i> ) maupun dari sisi pencapaian anggaran per triwulannya.	Adanya laporan monitoring, evaluasi, dan realisasi rencana aksi BKAD per triwulan	<b>V</b>		

4.	Target kinerja dalam rencana aksi beserta pencapaiannya dijadikan salah satu acuan untuk memberikan pertimbangan kegiatan untuk diteruskan ataupun ditunda.	Target kinerja dalam rencana aksi beserta pencapaiannya telah dijadikan salah satu acuan untuk memberikan pertimbangan kegiatan untuk diteruskan ataupun ditunda.	<b>V</b>		
5.	Mekanisme pengumpulan data agar dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan dan ditunjuk penanggungjawabnya serta dibuat SOP yang mengatur jika terjadi kesalahan data sehingga mekanisme pengumpulan data ini dapat diandalkan.	Telah terdapat SOP terkait Data Kinerja	<b>V</b>		
6.	Pencapaian target kinerja dalam rencana aksi dan target kinerja pada perjanjian kinerja eselon II, III, dan IV serta individu pegawai untuk dijadikan dasar memberikan penghargaan dan hukuman ( <i>punishment and reward</i> ) kepada pegawai.	Pencapaian target kinerja dalam rencana aksi dan target kinerja pada perjanjian kinerja eselon II, III, dan IV serta individu pegawai telah dijadikan dasar memberikan penghargaan dan hukuman ( <i>punishment and reward</i> ) kepada pegawai.	<b>V</b>		
7.	Laporan kinerja dalam LKIP agar menyajikan semua analisis terhadap evaluasi yang telah dilakukan dengan menguraikan hambatan dan cara tindak penyelesaiannya secara keseluruhannya serta hasil tindak lanjut dari hasil tindak perbaikannya.	Laporan kinerja dalam LKIP agar menyajikan semua analisis terhadap evaluasi yang telah dilakukan dengan menguraikan hambatan dan cara tindak penyelesaiannya secara keseluruhannya serta hasil tindak lanjut dari hasil tindak perbaikannya.	<b>V</b>		
8.	Laporan kinerja dalam LKIP agar menyajikan capaian realisasinya disandingkan dengan target pada jangka menengah (Renstra) tahun terkait yang disertai analisis terhadap tercapainya atau tidak terhadap target pada jangka menengah tersebut.	Laporan kinerja dalam LKIP agar menyajikan capaian realisasinya disandingkan dengan target pada jangka menengah (Renstra) tahun terkait yang disertai analisis terhadap tercapainya atau tidak terhadap target pada jangka menengah tersebut.	<b>V</b>		
9.	Laporan kinerja agar menyajikan informasi penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam pencapaian kerjanya.	Laporan kinerja telah menyajikan informasi penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam pencapaian kerjanya.	<b>V</b>		
10.	Laporan Informasi kinerja agar dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta untuk peningkatan kinerja.	Laporan Informasi kinerja telah dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta untuk peningkatan kinerja.	<b>V</b>		
11.	Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi	Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi telah	<b>V</b>		

	saharusnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.			
12.	Monitoring dan evaluasi dari program/kegiatan/sub kegiatan untuk bisa menyajikan secara keseluruhan analisis dari pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan hambatan, solusi penanganannya, rencana perbaikan/rekomendasi dan progress tindak lanjut dari rekomendasi yang ditetapkan secara utuh dan berurutan.	Monitoring dan evaluasi dari program/kegiatan/sub kegiatan telah menyajikan secara keseluruhan analisis dari pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan hambatan, solusi penanganannya, rencana perbaikan/rekomendasi dan progress tindak lanjut dari rekomendasi yang ditetapkan secara utuh dan berurutan.	<b>V</b>		
13.	Pada monitoring dan evaluasi supaya menyajikan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Pada monitoring dan evaluasi telah menyajikan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan dalam bentuk langkah-langkah nyata.	<b>V</b>		
14.	Pencapaian kinerja pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan untuk ditingkatkan sehingga secara umum pada akhir renstra semua target dapat terlampaui.	Pencapaian kinerja pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan telah ditingkatkan sehingga secara umum pada akhir renstra semua target dapat terlampaui.	<b>V</b>		

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dan bermanfaat antara lain: (1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; (2) Menjalin instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan; (3) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja; serta (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari hasil pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran Rencana Strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2022, merupakan indikasi terhadap pelaksanaan Misi keempat RPJPD Kota Bogor 2005 – 2025, yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berketerampilan, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera**, dan indikasi terhadap pelaksanaan Misi kedua RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, yaitu **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**.

Secara keseluruhan realisasi pencapaian sasaran strategi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor disampaikan sebagai bahan laporan kinerja pemerintah Kota Bogor Tahun 2022.

Bogor, 23 Februari 2023

